



**RENSTRA (RENCANA STRATEGI)
TAHUN ANGGARAN 2021-2026
SEKRETARIAT DPRD KOTA MAKASSAR**



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DPRD KOTA MAKASSAR
TAHUN 2021 – 2026**

KATA PENGANTAR


Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat, berkat dan hidayahnya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Makassar Tahun 2021 – 2026, sesuai dengan jadwal dan mekanisme yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis (Renstra) SKPD ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat dari Pemerintah Kota Makassar dalam rangka penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2021 – 2026 yang disusun secara sistematis dan berkelanjutan dalam pelaksanaan program/kegiatan guna mewujudkan pelayanan Sekretariat DPRD Kota Makassar yang berkualitas terhadap kegiatan-kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Selain itu Rencana Strategis (Renstra) ini juga berisikan tentang Visi, Misi dan Tujuan organisasi Sekretariat DPRD Kota Makassar.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD Sekretariat DPRD Kota Makassar ini disadari masih banyak kelemahan dan kekurangan serta jauh dari kesempurnaan, untuk itu diperlukan ketelitian, kecermatan dan pengkajian yang lebih mendalam.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) SKPD Sekretariat DPRD Kota Makassar dapat disampaikan dengan harapan kiranya dapat diberikan saran, masukan, petunjuk dan usulan yang konstruktif sehingga Rencana Strategis (Renstra) menjadi lebih baik.

Makassar, 27 September 2021


H. DAHYAL, S.Sos, M.Si
Nip. 19730905 199303 1 007



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DPRD KOTA MAKASSAR TAHUN 2021 – 2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan kepada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Perangkat Daerah memuat tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas dan fungsinya.

Dalam system akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang merupakan instrument pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dinas/badan /kantor dan perangkat-perangkat daerah lainnya. Perencanaan strategis pemerintah juga merupakan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, lokal, nasional dan global namun tetap berada pada tatanan sistem manajemen nasional.

Dokumen Rencana Strategis Sekretariat DPRD yang disusun berfungsi sebagai landasan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD selama lima tahun ke depan, dan sebagai acuan untuk mencapai tujuan Sekretariat DPRD yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Walikota Makassar Bapak Ir. Moh. Ramdhan Pomanto dan Wakil Walikota Ibu Fatmawati Rusdi Priode 2021 – 2026 yang Alhamdulillah setelah dilantik oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 26 Februari 2021.

Tahapan proses penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Makassar adalah sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Makassar Tahap ini dilakukan dengan :
 - a) Membentuk Tim Penyusun Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tahun Anggaran 2021.
 - b) Melaksanakan orientasi mengenai renstra untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman dalam penyusunan Renstra Sekretariat DPRD.



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DPRD KOTA MAKASSAR TAHUN 2021 – 2026

- c) Menyusun tata kala sebagai panduan kerja, dan
 - d) Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Renstra Sekretariat DPRD.
2. Penyusunan rancangan awal Rencana Strategis Sekretariat DPRD Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap gambaran pelayanan Setda, analisis permasalahan, penelaahan dokumen Renstra Kemendagri, analisis isu strategis, dan perumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja.
 3. Penyusunan rancangan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Rancangan Renstra DPRD adalah penyempurnaan rancangan awal Renstra DPRD Kota Makassar tentang Penyusunan Renstra OPD Tahun 2021-2026.
 4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Forum Sekretariat DPRD membahas visi, misi, tujuan, sasaran, dan indikator sasaran Sekretariat DPRD yang menyepakati Cascading Renstra Sekretariat DPRD 2021-2026.
 5. Penyusunan rancangan akhir Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Makassar. Tahap ini merupakan penyempurnaan rancangan Renstra Sekretariat DPRD Kota Makassar menjadi rancangan akhir Renstra Sekretariat DPRD Kota Makassar dengan berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 6. Penetapan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Makassar. Rancangan akhir Renstra Sekretariat DPRD Kota Makassar disampaikan kepada Bappeda untuk diverifikasi. Renstra yang telah diverifikasi tersebut kemudian disampaikan kepada Walikota Makassar melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Walikota

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Makassar Tahun 2021 – 2026 adalah didasarkan pada beberapa ketentuan :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DPRD KOTA MAKASSAR TAHUN 2021 – 2026

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas peraturan daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar Tahun 2015-2034 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2015, Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DPRD KOTA MAKASSAR TAHUN 2021 – 2026

15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 5);
16. Peraturan Walikota Makassar Nomor 36 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 36);
17. Peraturan Walikota Makassar Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Makassar 2021 - 2026 dimaksudkan untuk memberi arah dan pedoman dalam pemanfaatan secara optimal sumber daya manusia, serta untuk menyesuaikan dan menyempurnakan atas tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Makassar untuk jangka 5 (lima) tahun kedepan sehingga mampu mengantisipasi setiap perubahan serta perkembangan yang ada dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tolak ukur dalam mencapai tujuan.

Maksud Penyusunan Renstra adalah sebagai pedoman dan landasan untuk menjabarkan Visi, Misi dan Program Sekretariat DPRD Kota Makassar yang mengacu pada Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Makassar terpilih yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 Kota Makassar.

1.3.2. Tujuan

Rencana strategis ini disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman bagi Sekretariat DPRD Kota Makassar dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) setiap tahunnya;
2. Sebagai pedoman untuk mengukur dan melakukan evaluasi tahunan Sekretariat DPRD Kota Makassar;
3. Sebagai pedoman dalam penetapan target kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Makassar;
4. Sebagai prosentase penilaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Makassar dalam pelaksanaan umum pendukung urusan Pemerintahan, urusan Sekretariat DPRD Kota Makassar

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renstra Sekretariat DPRD Kota Makassar ini terdiri dari :

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renstra agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DPRD KOTA MAKASSAR TAHUN 2021 – 2026

- 1.1 Latar Belakang
Memuat pengertian ringkas tentang Renstra, proses penyusunan Renstra, kedudukan Renstra tahun rencana dalam RPJMD keterkaitan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD.
- 1.2 Landasan Hukum
Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra, baik yang berskala nasional, maupun lokal yang ketentuannya secara langsung terkait dengan penyusunan Renstra.
- 1.3 Maksud dan Tujuan
Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RENSTRA bagi Kota Makassar dan sasaran penyusunan dokumen RENSTRA bagi Kota Makassar.
- 1.4 Sistematika Penulisan
Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RENSTRA terkait dengan pengaturan BAB serta garis besar isi setiap BAB di dalamnya.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KOTA MAKASSAR

Menjelaskan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah di Sekretariat DPRD yang dijabarkan berdasarkan hasil analisis dan kajian gambaran umum Sekretariat DPRD Kota Makassar yang Meliputi :

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Sekretariat DPRD
Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Makassar.
- 2.2 Sumber Daya Sekretariat DPRD
Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Sekretariat DPRD Kota Makassar dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.
- 2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD
Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD berdasarkan sasaran/target Renstra Sekretariat DPRD serta ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD
Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Sekretariat DPRD Kota Makassar, hasil telaahan terhadap



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DPRD KOTA MAKASSAR TAHUN 2021 – 2026

Kinerja Pelayanan, menganalisis tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan di Sekretariat DPRD pada lima tahun mendatang.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU– ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KOTA MAKASSAR

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD.

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Sekretariat DPRD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Makassar

Bagian ini mengemukakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yang terkait dengan visi, misi, serta program Walikota dan Wakil Walikota Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-B.35), dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Sekretariat DPRD Kota Makassar.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi/Kota

Mengemukakan faktor-faktor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan Sekretariat DPRD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Provinsi dan Kota Makassar

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Sekretariat DPRD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Sekretariat DPRD ditinjau dari implikasi RT/RW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Sekretariat DPRD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Sekretariat DPRD;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Sekretariat DPRD
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Sekretariat DPRD; dan
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Sekretariat DPRD.



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DPRD KOTA MAKASSAR TAHUN 2021 – 2026

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Kota Makassar yaitu mengemukakan tujuan dan sasaran jangka menengah beserta indikator kerjanya.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Sekretariat DPRD Kota Makassar dalam lima tahun mendatang, dijelaskan melalui tabel kinerja Sekretariat DPRD Kota Makassar.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya menggunakan Tabel dengan menyusun program dan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD.

BAB VII PENUTUP

Menguraikan pedoman transisi yang disusun untuk menjembatani kekosongan dokumen Rencana Strategis Sekretariat DPRD dengan memasukkan program-program yang diarahkan pada pencapaian target kinerja yang belum dicapai selama periode perencanaan sebelumnya berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KOTA MAKASSAR

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut, Pemerintah Daerah diselenggarakan berdasarkan otonomi Tingkat Provinsi dan Tingkat Kota/Kabupaten

Sehubungan hal tersebut dimana organisasi birokrasi pada umumnya Sekretariat DPRD Kota Makassar memiliki tugas, fungsi dan struktur organisasi yang sudah dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal yang berlandaskan pada peraturan walikota Makassar Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar.

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri atas:

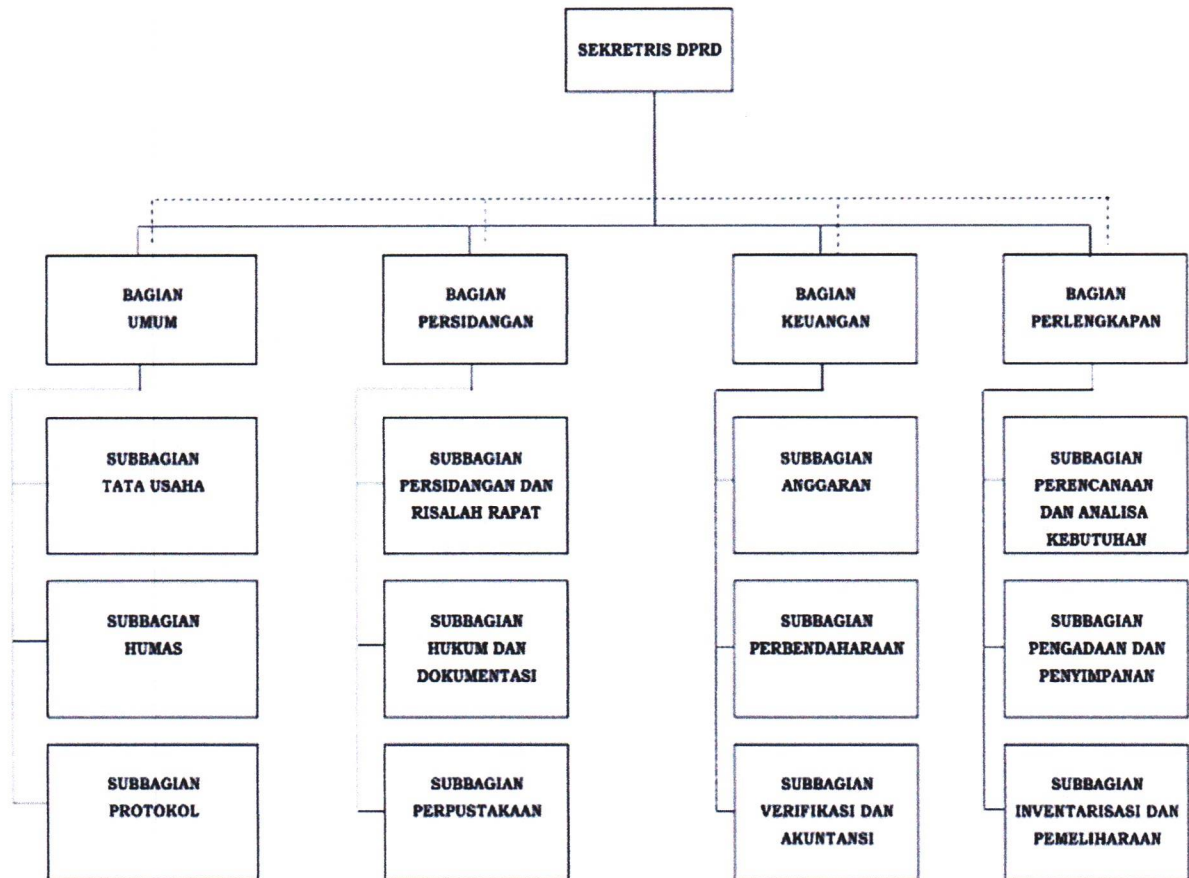
- a. Sekretaris DPRD;
- b. Bagian Umum, terdiri atas:
 1. Subbagian Tata Usaha;
 2. Subbagian Humas;
 3. Subbagian Protokol.
- c. Bagian Persidangan, terdiri atas:
 1. Subbagian Persidangan dan Risalah Rapat;
 2. Subbagian Hukum dan Dokumentasi;
 3. Subbagian Perpustakaan.
- d. Bagian Keuangan, terdiri atas:
 1. Subbagian Anggaran;
 2. Subbagian Perbendaharaan;
 3. Subbagian Verifikasi dan Akuntansi.
- e. Bagian Perlengkapan, terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan dan Analisa Kebutuhan;
 2. Subbagian Pengandaan dan Penyimpanan;
 3. Subbagian Inventarisasi dan Pemeliharaan.



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DPRD KOTA MAKASSAR
TAHUN 2021 – 2026**

Bagan 2.1

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**



Adapun deskripsi kerja masing-masing adalah sebagai berikut :

1. **Sekretaris DPRD**, mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
 - d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD
2. **Bagian Umum**, mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan ketatausahaan, rumah tangga dan kehumasan, keprotokolan, penerimaan aspirasi serta penyebarluasan informasi.

Di samping tugas pokok tersebut, Bagian Umum Mempunyai fungsi sebagai berikut :



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DPRD KOTA MAKASSAR TAHUN 2021 – 2026

- a. perencanaan operasional ketatausahaan, rumah tangga dan kehumasan, keprotokolan, penerimaan aspirasi serta penyebarluasan informasi;
- b. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan kehumasan, keprotokolan, penerimaan aspirasi serta penyebarluasan informasi;
- c. pengoordinasian urusan ketatausahaan, rumah tangga dan kehumasan, keprotokolan, penerimaan aspirasi serta penyebarluasan informasi;
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan kehumasan, keprotokolan, penerimaan aspirasi serta penyebarluasan informasi;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Kepala bagian Umum dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian yaitu Sub Bagian Tata usaha, Sub Bagian Protokol dan Sub Bagian Humas.

3. **Bagian Persidangan** Bagian Persidangan mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan rapat-rapat, penyusunan materi dan risalah rapat, dan memfasilitasi peninjauan/ kunjungan kerja DPRD serta pendokumentasian produk-produk hukum dan pembinaan perpustakaan sekretariat DPRD.

Di samping tugas pokok tersebut, bagian persidangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perencanaan kegiatan operasional di bidang persidangan;
2. Pelaksanaan kegiatan di bidang persidangan;
3. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang persidangan;
4. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang persidangan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya;

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Kepala bagian Persidangan dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian yaitu Sub Bagian Persidangan dan Risalah Rapat, Sub Bagian Hukum dan Dokumentasi dan Sub Bagian Perpustakaan

4. **Bagian Keuangan** Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan dan menyusun rencana anggaran serta mengoordinasikan penatausahaan dan laporan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD.

Di samping tugas pokok tersebut, sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan kegiatan operasional di bidang keuangan DPRD dan sekretariat DPRD;
- b. Pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan DPRD dan sekretariat DPRD;



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DPRD KOTA MAKASSAR TAHUN 2021 – 2026

- c. Pengoordinasian kegiatan di bidang keuangan DPRD dan sekretariat DPRD;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Keuangan DPRD dan sekretariat DPRD;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Kepala bagian Keuangan dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian yaitu Sub Bagian Anggaran, Sub Bagian Perbendaharaan dan Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi

5. **Bagian perlengkapan** Bagian Perlengkapan yang mempunyai tugas melaksanakan pengadaan perlengkapan kebutuhan DPRD dan sekretariat DPRD serta pemeliharaan/pengawasan gedung/kantor, rumah jabatan Pimpinan DPRD, kendaraan dinas dan barang inventaris lainnya.

Di samping tugas pokok tersebut, sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan kegiatan operasional di bidang perlengkapan DPRD dan sekretariat DPRD;
- b. Pelaksanaan kegiatan di bidang perlengkapan DPRD dan sekretariat DPRD;
- c. Pengoordinasian kegiatan di bidang perlengkapan DPRD dan sekretariat DPRD;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perlengkapan DPRD dan sekretariat DPRD;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya;

2.2. Sumber Daya SKPD

a. Sumber Daya Manusia Aparatur.

Sumber daya manusia aparatur Sekretariat DPRD Kota Makassar adalah sebanyak 64 orang Pegawai Negeri Sipil (ASN) yang terdiri dari 38 orang laki-laki dan 26 orang perempuan. Selain ASN terdapat 139 orang Tenaga Kontrak (Non ASN) yang terdiri dari 87 orang laki-laki dan 52 orang perempuan, jadi jumlah keseluruhan ASN dan Tenaga Kontrak (Non ASN) sebanyak 203 orang.



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DPRD KOTA MAKASSAR
TAHUN 2021 – 2026**

Tabel. 2.2.1

Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Tingkat Pendidikan					
Jenjang	ASN		Tenaga Kontrak		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	
Program S2	6	12	0	1	20
Program S1	22	9	29	31	91
Program D3	-	-	2	4	6
Program D1	-	-	3	-	3
SMA/SMK	12	4	40	22	76
SMP	1	-	-	-	1
SD	0	0	4	0	4
Jumlah	42	26	83	56	203

Sumber Data : Sub Bagian Kepegawaian Sek.DPRD Kota Makassar, 2021

Dari tabel di atas terlihat bahwa berdasarkan latar belakang pendidikan Pegawai Negeri Sipil (ASN) dan tenaga kontrak Sekretariat DPRD Kota Makassar sangat tinggi hal ini sudah sangat memadai.

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa latar belakang pendidikan ASN terdiri dari : 6 (Enam) orang laki – laki dan 12 (dua belas) orang perempuan yang berkualifikasi pendidikan S-2, sementara yang berkualifikasi pendidikan S-1 sebanyak 22 (dua puluh dua) orang laki – laki dan 9 (Sembilan) orang perempuan, yang berkualifikasi pendidikan Diploma Tiga tidak ada, sedangkan untuk jenjang pendidikan berkualifikasi SLTA sebanyak 12 (dua belas) orang laki – laki dan 4 (empat) orang perempuan dan untuk jenjang pendidikan berkualifikasi SLTP sebanyak 1 (Satu) orang laki – laki, Sementara tenaga kontrak berdasarkan latar belakang pendidikan terdiri dari SD,SLTP,SLTA, S1 dan S2.

Dukungan sumber daya manusia aparatur untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Makassar secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DPRD KOTA MAKASSAR
TAHUN 2021 – 2026**

Tabel 2.2.2

Jumlah Pegawai berdasarkan pangkat dan Golongan dan tenaga Kontrak

Pangkat	Gol	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Pembina Utama Muda	IV c	-	-	-
Pembina Tingkat I	IV b	3	-	3
Pembina	IV a	2	5	7
Penata Tingkat I	III d	5	5	10
Penata	III c	1	6	7
Penata Muda Tingkat I	III b	3	3	6
Penata Muda	III a	10	2	12
Pengatur Tk.I	II d	7	3	10
Pengatur	II c	5	-	5
Pengatur Muda Tk. I	II b	3	1	4
Pengatur Muda	II a	1	-	1
Tenaga Kontrak	-	86	52	138
Jumlah		126	77	203

Sumber Data : Sub Bagian Kepegawaian Sek.DPRD Kota Makassar, 2021

Dilihat dari aspek komposisi pegawai pada saat ini khususnya pada status kepegawaian, maka penempatan pejabat/pegawai telah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan, sebagaimana dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Tabel 2.2.3

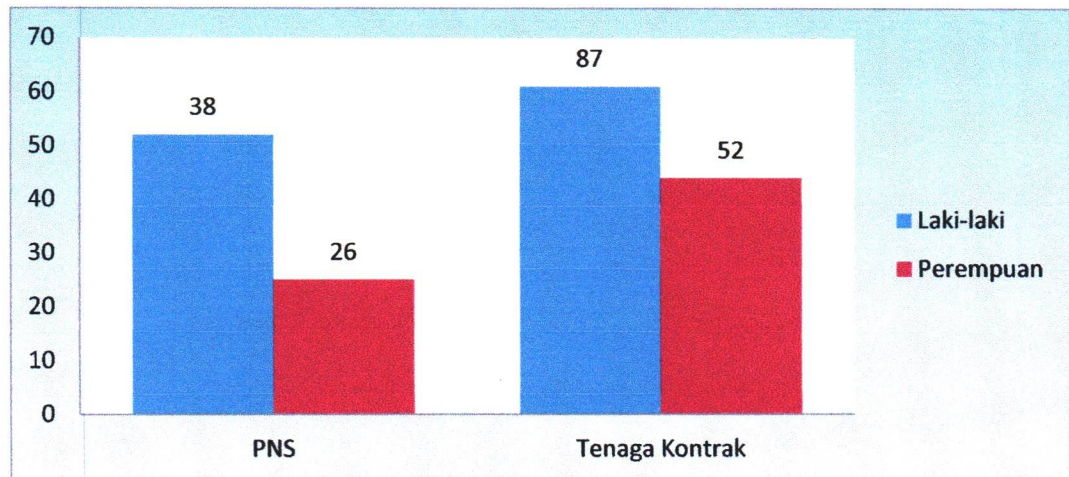
Jumlah Pegawai berdasarkan eselon

Eselon			
Eselon	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
II – b	-	-	-
III – a	4	-	4
IV – a	6	6	12
Jumlah	11	6	16

Sumber Data : Sub Bagian Kepegawaian Sek.DPRD Kota Makassar, 2021

Gambar 2.2.4

Keadaan Pegawai Lingkup Sekretariat DPRD Kota Makassar berdasarkan status kepegawaian.

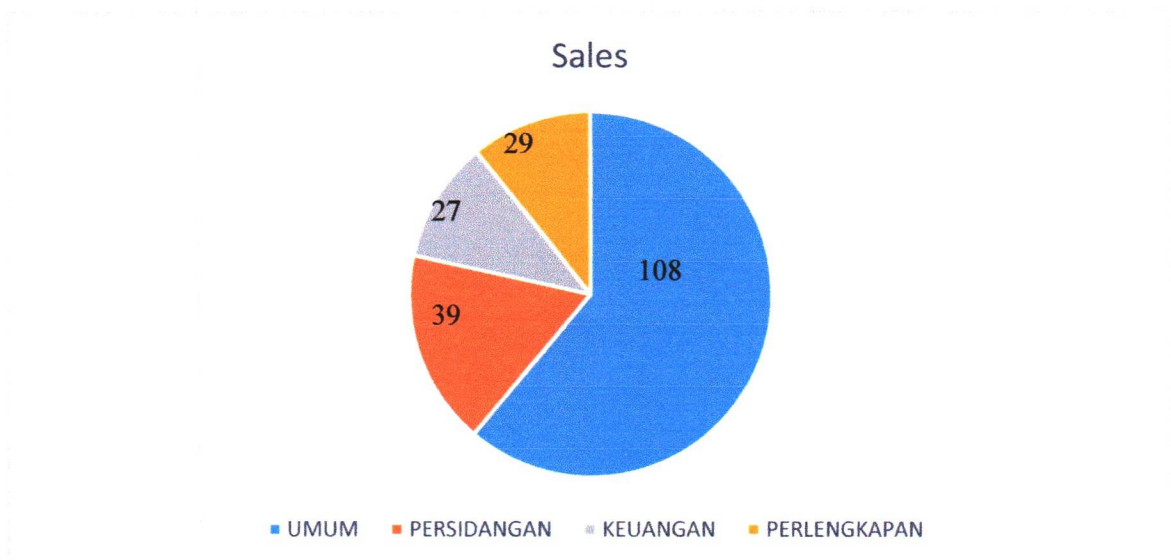


Sumber Data : Sub Bagian Kepegawaian Sek.DPRD Kota Makassar, 2021

Pada gambar di atas terlihat komposisi berdasarkan status kepegawaian bahwa jumlah Aparatur Sipil Negara baik laki-laki dan perempuan jika dibandingkan jumlah tenaga kontrak laki-laki dan perempuan, maka dapat dilihat bahwa dengan jumlah ASN sebanyak 64 orang (pejabat 16 orang dan staf 48 orang) sudah memandai sementara tenaga kontrak dengan jumlah 139 orang sudah melebihi dari kebutuhan Sekretariat DPRD Kota Makassar.

Gambar 2.2.5

Keadaan Pegawai Lingkup Sekretariat DPRD Kota Makassar berdasarkan distribusi pada tiap bagian



Sumber Data : Sub Bagian Kepegawaian Sek.DPRD Kota Makassar, 2021

Dari gambar diatas terlihat bahwa berdasarkan distribusi pegawai, bagian umum berjumlah 108 (Seratus delapan) orang; Bagian Persidangan berjumlah 39 (Tiga puluh sembilan) orang; Bagian Keuangan berjumlah 27



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DPRD KOTA MAKASSAR
TAHUN 2021 – 2026**

(Dua Puluh Tuju) orang; Bagian Perlengkapan berjumlah 29 (Dua Puluh Sembilan) orang; Distribusi pegawai ini berdasarkan tingkat beban kerja dan kapasitas ruangan yang ada.

Sumber daya manusia aparatur Sekretariat DPRD Kota Makassar, telah mengikuti Pendidikan & Pelatihan (Diklat) penjenjang Struktural. Hal ini dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 2.2.6

Pegawai Negeri Sipil (ASN) yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

No.	Uraian	Jumlah (orang)
a.	Diklat Kepemimpinan	
1	Diklat SPAMEN/Diklat PIM Tk.II	-
2	Diklat SPAMA/Diklat PIM TK.III	4
3	Diklat ADUM/ADUMLA/Diklat PIM Tk.IV	12
b.	Diklat lainnya	0
	Jumlah	16

Sumber Data : Sub Bagian Kepegawaian Sek.DPRD Kota Makassar, 2021

Berdasarkan tabel diatas pada poin a Diklat Kepemimpinan, dari 16 pejabat Eselon yang ada, 16 orang pejabat eselon telah mengikuti Diklat tersebut sebagai syarat jabatan, selebihnya adalah staf.

Tabel 2.2.7

Rencana Kebutuhan SDM (ASN) Sekretariat DPRD Kota Makassar

No	Nama Jabatan	Jumlah Kondisi SDM Saat Ini (s.d Semester I Tahun 2021)			Jumlah Kebutuhan SDM s.d Tahun 2026		Jumlah Pemenuhan SDM s.d Tahun 2026	
		ASN	P3K	Non ASN	ASN	P3K	ASN	P3K
1	Sekretaris DPRD	-			1		-	
2	Kabag Umum	1			1		1	
3	Kasubag Tata Usaha	1			1		1	
3.1	Pengadministrasi Persuratan	4			4	-	4	
3.2	Pengadiminstrasi Umum	2			2		2	
3.3	Pengelola Kepegawaian	2			2		2	
3.4	Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik	-			3		-	



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DPRD KOTA MAKASSAR
TAHUN 2021 – 2026**

No	Nama Jabatan	Jumlah Kondisi SDM Saat Ini (s.d Semester I Tahun 2021)			Jumlah Kebutuhan SDM s.d Tahun 2026		Jumlah Pemenuhan SDM s.d Tahun 2026	
		ASN	P3K	Non ASN	ASN	P3K	ASN	P3K
3.5	Ajudan	-			5		-	
3.6	Pengemudi	1			6		1	
3.7	Pranata Jamuan	6			6		6	
4	Kasubag Rumas	1			1		1	
4.1	Pengadministrasi Umum	1			1		1	
4.2	Analisis Sistem Informasi	1			1		1	
4.3	Pengelola Data Laporan dan Pengaduan	1			1		1	
5	Kasubag pertokol	1			1		1	
5.1	Pengadministrasi Umum	1			1		1	
5.2	Petugas Protokol	-			2		-	
5.3	Pengelola Perjalanan Dinas	-			4		-	
5.4	Pranata Acara	1			2		1	
6	Kabag Persidangan	1			1		1	
7	Kasubag Persidangan dan Risalah Rapat	1			1		1	
7.1	Analisis Materi Sidang	1			1		1	
7.2	Notulis Rapat	-			12		-	
7.3	Pengadministrasi Rapat	-			1		-	
7.4	Pengadministrasi Risalah	-			1		-	
7.5	Pengelola Persidangan	1			1		1	
7.6	Penyusun Risalah	2			2		2	
7.7	Penyusun Naskah Rapat Pimpinan	2			2		2	
7.8	Pengadministrasi Umum	1			1		1	
8	Kasubag Hukum dan Dokumentasi	1			1		1	
8.1	Pengadministrasi Umum	-			1		-	



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DPRD KOTA MAKASSAR
TAHUN 2021 – 2026**

No	Nama Jabatan	Jumlah Kondisi SDM Saat Ini (s.d Semester I Tahun 2021)			Jumlah Kebutuhan SDM s.d Tahun 2026		Jumlah Pemenuhan SDM s.d Tahun 2026	
		ASN	P3K	Non ASN	ASN	P3K	ASN	P3K
8.2	Analisis Legislasi	2			2		2	
8.3	Analisis Produk Hukum	2			2		2	
8.4	Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum	-			1		-	
8.5	Pengolah Data	-			1		-	
9	Kasubag Perpustakaan	1			1		1	
9.1	Pengadministrasian Perpustakaan	1			1		1	
9.2	Pengelola Bahan Pustaka	1			1		1	
10	Kabag Kabag keuangan	1			1		1	
11	Kasubag Anggaran	1			1		1	
11.1	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	2			2		2	
11.2	Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran	2			2		2	
11.3	Pengelola Data Pelaksanaan Program dan Anggaran	-			1		-	
11.4	Pengadministrasian Umum	2			1		1	
12	Kasubag Perbendaharaan	1			1		1	
12.1	Bendahara	-			1		1	
12.2	Penata Keuangan	1			2		1	
12.3	Pengelola Keuangan	-			2		-	
12.4	Pengadministrasian Umum	1			2		1	
13	Kasubag Verifikasi dan akuntansi	1			1		1	
13.1	Pengadministrasian Umum	-			2		-	
13.2	Penyusunan Laporan Keuangan	2			2		2	
13.3	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja	2			2		2	



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DPRD KOTA MAKASSAR
TAHUN 2021 – 2026**

No	Nama Jabatan	Jumlah Kondisi SDM Saat Ini (s.d Semester I Tahun 2021)			Jumlah Kebutuhan SDM s.d Tahun 2026		Jumlah Pemenuhan SDM s.d Tahun 2026	
		ASN	P3K	Non ASN	ASN	P3K	ASN	P3K
14	Kabag Perlengkapan	1			1		1	
15	Kepala Subbagian Perencanaan Dan Analisa Kebutuhan	1			1		1	
15.1	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	1			1		1	
15.2	Pengelola Data	1			2		1	
16	Kepala Subbagian Pengadaan Dan Penyimpanan	1			1		1	
16.1	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	1			2		1	
16.2	Pengelola Data	2			2		2	
16.3	Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana	1			1		1	
17	Kepala Subbagian Inventarisasi Dan Pemeliharaan	1			1		1	
17.1	Pengadministrasi Umum	1		1	1			
17.2	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	2			2		2	
17.3	Penyusun Rencana Rehabilitas	1			1		1	

Sumber : Anjab dan ABK Tahun 2021



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DPRD KOTA MAKASSAR
TAHUN 2021 – 2026**

Tabel 2.2.8

**Rencana Kebutuhan Peningkatan Kompetensi SDM
Sekretariat DPRD Kota Makassar**

No	Nama Jabatan	Jumlah SDM Yang Sudah Mengikuti Diklat (s.d Semester I Tahun 2021)			Rencana Jumlah SDM Yang Diusulkan Mengikuti Diklat (s.d Tahun 2025)		
		Fungsional	Struktural	Teknis Lainnya	Fungsional	Struktural	Teknis Lainnya
1	Sekretaris DPRD						
2	Kabag Umum						
3	Kasubag Tata Usaha						
3.1	Analisis SDM Aparatur	0	0	0	0	2	
3.2	Pengadministrasi Umum	0	0	0	0	4	
3.3	Pengadministrasi Kepegawaian	0	0	0	0	2	
	Ajudan	0	0	0	0	1	
4	Kasubag humas						
4.1	Pengelola Sarana Prasarana Rumah Tangga Dinas	0	0	0	0	7	
4.2	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga Dan Perlengkapan	0	0	0	0	1	
4.3	Pranata Jamuan	0	0	0	0	4	
4.4	Pramu Kebersihan	0	0	0	0	2	
5	Kasubag Protokol						
5.1	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	0	0	0	0	2	
	Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana	0	0	0	0	2	
	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	0	0	0	0	2	
6	Kabag Keuangan						
7	Kasubag Anggaran						
7.1	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	0	0	0	0		
	Pengelola Bahan Perencanaan	0	0	0	0		
8	Kasubag Verifikasi dan akuntansi						



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DPRD KOTA MAKASSAR
TAHUN 2021 – 2026**

No	Nama Jabatan	Jumlah SDM Yang Sudah Mengikuti Diklat (s.d Desember Tahun 2021)			Rencana Jumlah SDM Yang Diusulkan Mengikuti Diklat (s.d Tahun 2023)		
		Fungsional	Struktural	Teknis Lainnya	Fungsional	Struktural	Teknis Lainnya
8.1	Verifikator Data Laporan Keuangan	0	0	0	0	2	
	Penata Keuangan	0	0	0	0	2	
9	Kasubag Perbendaharaan						
9.1	Bendahara	0	0	0	0	6	
9.2	Pengadministrasi Keuangan	0	0	0	0	6	
10	Kabag Persidangan						
11	Kasubag Persidangan dan risalah rapat						
11.1	Pengelola Peraturan Perundang Undangan	0	0	0	0	2	
11.2	Analisis Peraturan Perundang Undangan dan Rancangan Peraturan Perundangan Undangan	0	0	0	0	2	
12	Kasubag Hukum dan dokumentasi						
12.1	Pengadministrasi Risalah	0	0	0	0	2	
12.2	Notulis Rapat	0	0	0	0	2	
13	Kasubag Perpustakaan						
13.1	Pengadministrasi Risalah	0	0	0	0	2	
13.2	Penyusun Risalah	0	0	0	0	10	
14	Kabag Perlengkapan						
15	Kasubag Perencanaan dan analisa kebutuhan						
15.1	Notulis Rapat	0	0	0	0	2	
15.2	Analisis Perencanaan Anggaran	0	0	0	0	1	
16	Kasubag Pengadaan dan penyimpanan						
16.1	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	0	0	0	0	2	
16.2	Pranata Acara	0	0	0	0	7	
16.3	Petugas Protokol	0	0	0	0	2	
16	Kasubag Pemeliharaan						
16.1	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	0	0	0	0	2	
16.2	Pranata Acara	0	0	0	0	7	
16.3	Petugas Protokol	0	0	0	0	2	

Sumber : Anjab Tahun 2021



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DPRD KOTA MAKASSAR
TAHUN 2021 – 2026**

b. Sarana dan Prasarana

Sekretariat DPRD Kota Makassar berada di Jalan Andi Pangerang Pettarani Blok E 1-2 Makassar. Gedung kantor yang ditempati ini terdiri atas beberapa ruangan yang disesuaikan dengan jumlah dan struktur organisasi Sekretariat DPRD Kota Makassar dan dilengkapi dengan ruang-ruang untuk anggota DPRD . Ruangan tersebut cukup nyaman digunakan juga jaringan *wireless fidelity (wifi)* sehingga dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Makassar. Sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Makassar tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.7.

Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Kantor.

No.	Nama Barang	Jumlah Unit	Keterangan
1	Kendaraan Roda Empat	102	
2	Kendaraan Roda Dua	111	
3	AC	213	
4	Dispenser	56	
5	Faximili	5	
6	Filling Kabinet	131	
7	Handycam	6	
8	Jaringan Komputer	2	
9	Kamera	17	
10	Komputer	95	
11	Kursi	250	
12	Layar Proyektor	5	
13	Meja	410	
14	Mesin Ketik	5	
15	LCD Proyektor	5	
16	Notebook	186	
17	Printer	157	
18	Scanner	17	
19	Televisi	47	

Sumber Data : Sub Bagian Kajian Inventarisasi dan Pemeliharaan Sek.DPRD Kota Makassar, 2021

Tabel 2.8

Data Aset Tidak Berwujud Sekretariat DPRD Kota Makassar

No	Nama	Keterangan
1	2	
1.	Apliasi mobile "AJAMMA"	Fasilitasi yang dapat digunakan warga Kota Makassar untuk menyampaikan aspirasi ke DPRD Kota Makassar



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DPRD KOTA MAKASSAR TAHUN 2021 – 2026

2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Makassar

Tingkat kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kota Makassar ditunjukkan dengan tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Makassar berdasarkan target Renstra Sekretariat DPRD Kota Makassar periode sebelumnya. Secara terperinci evaluasi pelaksanaan kinerja Sekretariat DPRD Kota Makassar berdasarkan Renstra ditunjukkan pada Tabel 2.3 yang berisi Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD dan Tabel 2.4 yang berisi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD terlampir :



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DPRD KOTA MAKASSAR
TAHUN 2021 – 2026**

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Kota Makassar
Tahun 2021 - 2026

N O.	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD	TARG ET SPM	TARG ET IKK	TARGET INDIKA TOR LAINNY A	SATUAN	TARGET RENSTRA BAPPEDA TAHUN KE-						REALISASI CAPAIAN PADA TAHUN KE-						RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-								
						2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026						
1	Persentase Staf yang mengikuti Diklat, Kunjungan Kerja dan Konsultasi		100%		Persentase	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	109%	91,76%	100 %	100%	100 %	109%	92 %
2	Persentase SPPD yang terbit sesuai dengan standar waktu yang di proses dengan SIM		100%		Persentase	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	3.07 %	50	0%	0%	0%	3%	0%	0%	0%	3%	0%	0%
3	Jumlah Pengunjung Website DPRD		15,000		orang	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	0	3000	3000	36768	36768	0%	100%	100 %	1226 %	125	6%	100%	100%	1226 %	125	6%
4	Persentase kegiatan yang dimuat dalam Website		100%		Persentase	100%	100 %	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %
5	Persentase Dokumen pengadaan barang dan jasa yang terbit sesuai dengan standar waktu yang di proses SIM.		100%		Persentase	100%	100 %	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DPRD KOTA MAKASSAR
TAHUN 2021 – 2026**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
6	Penyempulan Info kegiatan via SMS Box		100%		Persentase	100%	100 %	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100 %	100%	100 %
7	Persentase kegiatan DPRD via Running Teks		100%		Persentase	100%	100 %	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100 %	100%	100 %
8	Persentase Perda yang telah dipublikasikan via Website		100%		Persentase	100%	100 %	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100 %	100%	100 %
9	Indeks Kepuasan terhadap pelayanan kedinasan		100%		Persentase	100%	100 %	100%	100%	100%	87.5 %	87.5 %	87.5 %	87.5 %	87.5%	88%	88%	88%	88%	88 %
10	Pemenuhan standar waktu pelayanan administrasi bagi anggota DPRD		100%		Persentase	100%	100 %	100%	100%	100%	87.5 %	87.5 %	87.5 %	87.5 %	87.5%	88%	88%	88%	88%	88 %
11	Persentase sarana dan prasarana yang baik		100%		Persentase	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100 %	100%	100 %
12	persentase risalah rapay yang tepat waktu		100%		Persentase	100%	100 %	100%	100%	100%	80.53 %	80.53 %	80.55 %	80.56 %	80.51%	81%	81%	81%	81%	81 %



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DPRD KOTA MAKASSAR
TAHUN 2021 – 2026**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
13	Tingkat Kepuasan stakeholder terhadap pelayanan tamu/pengunjung		100%		Persentase	100%	100 %	100%	100%	100%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75 %
14	Persentase Kelompok masyarakat yang memberikan aspirasi yang di fasilitasi		100%		Persentase	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100 %	100%	100 %
15	Jumlah kegiatan anggota DPRD yang di Fasilitasi		100%		Persentase	100%	100 %	100%	100%	100%	78%	80%	75%	70%	88%	78%	80%	75%	70%	88 %



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DPRD KOTA MAKASSAR TAHUN 2021 – 2026

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Makassar

Berdasarkan kondisi yang ada di lingkungan Sekretariat DPRD di kaitkan dengan beban tugas dan tanggung jawab yang harus diemban yaitu melayani kepentingan dan kebutuhan anggota DPRD maka terdapat banyak tantangan dan peluang yang di hadapi dalam setiap permasalahan yang ada.

a. Tantangan

Tantangan yang dihadapi Sekretariat DPRD Kota Makassar dalam mencapai sasaran yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Dinamika kegiatan Dewan
2. Profesionalitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD Kota Makassar
3. Tingginya standar pelayanan dan dukungan yang dibutuhkan anggota DPRD
4. Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah
5. Dukungan anggaran yang diperlukan tidak sesuai dengan cash budget yang telah ditentukan.

b. Peluang

Peluang yang dapat mendukung Sekretariat DPRD Kota Makassar dalam mencapai sasaran yang diharapkan antara lain sebagai :

1. Adanya ketepatan dan kepastian pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penjadwalan yang telah ditetapkan.
2. Adanya upaya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia.
3. Peningkatan kelancaran dan ketertiban berbagai kegiatan DPRD dengan dukungan pembiayaan dan sarana perkantoran yang ideal.
4. Pengembangan Aplikasi Teknologi Informasi untuk peningkatan aksesibilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota DPRD.
5. Tersedianya Peraturan Pemerintah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DPRD KOTA MAKASSAR TAHUN 2021 – 2026

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KOTA MAKASSAR

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Makassar

Permasalahan Strategis yang dihadapi Sekretariat DPRD Kota Makassar berkaitan erat dengan Isu Strategis Organisasi sebagai pilihan kebijakan mendasar yang mempengaruhi visi, misi, nilai, tingkat dan kombina pelaksanaan tugas, biaya organisasi, ataupun manajemen organisasi. Permasalahan strategis muncul karena berbagai alasan dan perubahan lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal organisasi yang sangat penting untuk diperhatikan karena akan menjadi tantangan besar yang dihadapi oleh organisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Sehubungan tersebut Sekretariat DPRD Kota Makassar merumuskan permasalahan yang dihadapi masing-masing berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

- a. Kualitas Sumberdaya Aparatur Sekretariat DPRD Kota Makassar masih perlu ditingkatkan;
- b. Pentingnya disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) atas system Pelayanan pada Sekretariat DPRD Kota Makassar;
- c. Prasarana persidangan dan ruang kerja anggota DPRD perlu ditingkatkan;
- d. Belum Optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia;
- e. Belum Optimalnya pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan;
- f. Masih belum optimalnya fungsinya pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
- g. Dinamika politik yang berkembang di Lembaga DPRD, ikut mewarnai dalam kelancaran pengambilan keputusan;
- h. Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diikuti dengan peningkatan aksesibilitasnya
- i. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis.



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DPRD KOTA MAKASSAR TAHUN 2021 – 2026

Adapun Sekretariat DPRD Kota Makassar mengidentifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel sebagai berikut :

Tabel T-B 35
Identifikasi Permasalahan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Belum optimalnya pelayanan Sekretariat DPRD kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	Terbatasnya Sumber Daya Aparatur, sehingga sulit mencapai pelayanan yang maksimal pada Anggota Dewan	Jumlah Sumber Daya Aparatur yang belum memadai untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.
		Terbatasnya sarana dan prasana persidangan Anggota DPRD	Tidak memadainya ruangan persidangan dan ruang kerja Anggota DPRD
		Belum optimalnya penyusunan perencanaan program	

3.2. Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi RPJMD Kota Makassar Tahun 2021-2026 sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2021-2026 (Pasal 16 Ayat (2) huruf b) Sebagaimana visi Kepala Daerah untuk RPJMD 2021-2026 adalah "***Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia yang Sombere dan Smart City dengan Imunitas Kota yang kuat untuk Semua***". Yang dimaknai kata yang terkandung didalam Visi 2 (dua) penjelasan umum dan 3 (tiga) Pokok Visi. Kedua penjelasan umum tersebut merupakan kalimat yang menjelaskan dengan penjelasan umum dan penjelasan masing-masing Pokok Visi dapat dilihat pada tabel berikut ini :



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DPRD KOTA MAKASSAR
TAHUN 2021 – 2026**

Visi	Penjelasan Umum	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
1	2	3	4
Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia yang "Sombere' dan Smart City" dengan Imunitas Kota yang kuat untuk semua	Percepatan mengandung makna bahwa Pemerintah Kota Makassar akan melakukan akselerasi-tidak sekedar secara normal saja (business as usual)- dalam menjalankan Pemerintahan dalam semua aspek	Kota Dunia	Percepatan mengandung makna bahwa Pemerintah Kota Makassar akan melakukan akselerasi-tidak sekedar secara normal saja (business as usual)- dalam menjalankan Pemerintahan dalam semua aspek
		Sombere' dan Smart City	Perwujudan dari nilai-nilai luhur budaya etnis "Bugis Makassar" yang ramah tamah dan santun serta bersahabat dan didukung pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan. Sombere' berkaitan dengan Heartware atau "Perangkat Hati", sedangkan Smart City berkaitan dengan Hardware dan Software atau "Perangkat Keras" dan "Perangkat Lunak". Diharapkan dengan Sombere' dan Smart City menjadikan Makassar Kota cerdas yang berbasis teknologi serta berkarakter



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DPRD KOTA MAKASSAR
TAHUN 2021 – 2026**

1	2	3	4
		Imunitas Kota Yang Kuat	Perwujudan Makassar sebagai resilient city yang tangguh yang memiliki kemampuan mempersiapkan diri, menghadapi dan memulihkan diri ketika menghadapi bencana/guncangan di masa depan (ekonomi, lingkungan, sosial & kesehatan) guna mendorong pembangunan berkelanjutan, serta tangguh terhadap kemungkinan/ancaman bencana, termasuk dampak perubahan iklim dan semakin berkembangnya jumlah penduduk yang tinggal dipertanian
		Untuk Semua	Kota Makassar sebagai kota inklusif yang dapat dinikmati dan dirasakan seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi berdasarkan jenjang umur, jenis kelamin, status sosial termasuk kelompok difabel serta memperkecil disparitas sosial dan ekonomi, sehingga tercipta kesetaraan dan inklusivitas

Untuk mendukung dan memberhasilkan Visi tersebut telah dirumuskan dalam beberapa Misi yaitu :

Misi 1 : Revolusi SDM dan Percepatan Reformasi birokrasi menuju SDM kota yang Unggul dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dari indikasi korupsi dengan mencakup "8 (delapan) Program Strategis Makassar Dua Kali Terus Tambah Baik" yaitu ;



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DPRD KOTA MAKASSAR TAHUN 2021 – 2026

- a. Revolusi pendidikan semua harus sekolah;
- b. Perkuatan keimanan ummat;
- c. 1.000 beasiswa Anak Lorong berprestasi;
- d. 10.000 skill training gratis;
- e. Percepatan Tata Pemerintahan "sombere dan Smart" bersih dari indikasi Korupsi;
- f. Menuju PAD Rp. 2 Triliyun;
- g. Menuju Insentif Kinerja RT/RW Rp.2 Juta dan perkuatan fungsi RT/RW dan Penasehat Walikota Serta Para Local influencer;
- h. Kelurahan menjadi pusat Pelayanan Publik yang "Sombere dan Smart".

Misi 2 : Rekonstruksi Kesehatan, Ekonomi, Sosial dan Budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi dan kesehatan yang kuat untuk semua dengan mencakup "8 (delapan) Program Strategis Makassar Dua Kali Terus Tambah Baik" yaitu ;

- a. Gerakan Masyarakat perkuatan imunitas kesehatan dan ekonomi;
- b. Perkuatan fasilitas perlindungan dan pelayanan kesehatan masyarakat;
- c. Penyediaan dengan kemudahan Akses 100.000 peluang kerja dan peluang Bisnis Baru;
- d. Penataan Total Sistem BUMD dan Pembentukan Makassar Incorporation;
- e. Pembuatan Perda OMNIBUS "Makassar Kota Dunia";
- f. Percepatan Program jagai Ana'ta dan Program Smart Milenial serta Sosial Mitigation
- g. Penataan total Destinasi Budaya dan Sejarah;
- h. Penguatan "City Branding" dan peningkatan festival dan MICE bulanan dalam skala Nasional dan Internasional.

Misi 3 : Restorasi ruang kota yang inklusif menuju kota nyaman kelas dunia yang Sombere dan Smart City untuk semua dengan mencakup "8 (delapan) Program Strategis Makassar Dua Kali Terus Tambah Baik" yaitu ;

- a. Penataan Total Sistem Persampahan;
- b. Pembenahan Total Sistem Penanganan Banjir dan Penanganan kemacetan ;



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DPRD KOTA MAKASSAR TAHUN 2021 - 2026

- c. Pembangunan Infrastruktur dan pembangunan Kawasan "Waterfront City" Berbasis Mitigasi dan Adaptasi Lingkungan;
- d. Peningkatan Jejaring Smart Pedestrian dan Koridor Hijau Kota;
- e. Peningkatan Lorong Garden dan Pembentukan 5.000 Lorong Wisata;
- f. Percepatan Pembangunan sistem dan Infrastruktur "sombere dan Smart City" yang inklusif;
- g. Percepatan Makassar menjadi liveable city dan Resilient City;
- h. Pembangunan Gedung Sombere dan Smart, New Balaikota dan New DPRD.

Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsinya Sekretariat DPRD telah mengakomodir Misi ke 2 (Dua) dari Misi Walikota dan Wakil Walikota Makassar yakni "***Rekonstruksi Kesehatan, ekonomi, social dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi dan kesehatan yang kuat untuk semua***" yang menitik beratkan pada point ke 4 dan ke 5 yaitu Penataan Total Sistem BUMD dan Pembentukan Makassar Incorporation serta Pembuatan Perda OMNIBUS "Makassar Kota Dunia".

Selanjutnya dari Misi yang telah dipilih tersebut, maka Sekretariat DPRD Kota Makassar menyajikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Makassar tersebut dalam table berikut ini :



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DPRD KOTA MAKASSAR
TAHUN 2021 – 2026**

Tabel
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Makassar Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

NO.	MISI DAN PROGRAM KDH DAN WAKIL KDH TERPILIH.	PERMASALAHAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KOTA MAKASSAR	FAKTOR.	
			PENGHAMBAT.	PENDORONG.
1	2	3	4	5
1	<p>Rekonstruksi Kesehatan, Ekonomi, Sosial dan Budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi dan kesehatan yang kuat untuk semua dengan mencakup "8 (delapan) Program Strategis Makassar Dua Kali Terus Tambah Baik" yaitu diantaranya ;</p> <p>a. Penataan Total Sistem BUMD dan Pembentukan Makassar Incorporation;</p> <p>b. Pembuatan Perda OMNIBUS "Makassar Kota Dunia";</p>	<p>Memfasilitasi pembahasan raperda dan sinkronisasi agenda pemerintahan dan DPRD</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur Sekretariat DPRD - Kurangnya komunikasi antara Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD mengenai jadwal kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD 	<ul style="list-style-type: none"> - Tingginya standar pelayanan dan dukungan yang dibutuhkan anggota DPRD - Badan Musyawarah sebagai fungsi yang membuat jadwal pembahasan Raperda dan jadwal kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD - Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi - Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) - Terintegrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DPRD KOTA MAKASSAR TAHUN 2021 – 2026

3.3. Telaahan Renstra Sekretariat DPRD Kota Makassar Dan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

Program yang ada di Depdagri yang menyangkut masalah kegiatan untuk Anggota DPRD yaitu mengenai WorkShop dan Sosialisasi tentang Pembahasan Perundang-undangan atau mengenai peraturan-peraturan terbaru. Peningkatkan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel dibidangnya serta untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Mengikuti kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah Daerah. Mengingat tupoksi Sekretariat DPRD memiliki tugas utama terkait dengan tugas menyelenggarakan administrasi Kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Provinsi dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi/permasalahan yang mempengaruhi langkah dan proses serta menentukan keberhasilan dalam pencapaian visi dan misi, dalam rangka pencapaian visi dan misi, maka isu strategis yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Makassar adalah sebagai berikut :

- a. Mempertajam fungsi-fungsi DPRD (pengawasan, legislasi dan budgeter);
- b. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD;
- c. Peningkatan dukungan anggaran, sarana dan prasarana kantor, serta sumber daya aparatur, baik aspek intelektual, administrasi dan manajemen, melalui kegiatan pelatihan-pelatihan;
- d. Ketersediaan ruang publik sebagai bagian dari upaya menyediakan ruang aspirasi masyarakat;
- e. Mengkoordinasi rencana kegiatan dengan pihak terkait baik internal maupun eksternal.



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DPRD KOTA MAKASSAR TAHUN 2021 - 2026

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Kota Makassar

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan harus memenuhi kriteria dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, disusun dengan Bahasa yang jelas dan mudah dipahami, dan disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran dalam RPJMD menjadi landasan dalam perumusan tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kota Makassar. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Kota Makassar dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut ini :

Tabel T -C.25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi kinerja awal review	Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
				2022	2023	2024	2025	2026
Peningkatan kualitas pelayanan kesekretariatan DPRD Kota Makassar	Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan DPRD Kota Makassar	Indeks kepuasan layanan terhadap agenda DPRD	70 %	71%	72%	73%	74%	75%



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DPRD KOTA MAKASSAR TAHUN 2021 – 2026

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah / Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategis merupakan rangkaian tahapan atau langka-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah ditetapkan. Strategis yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip : menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang, didasarkan pada capaian kinerja pembangunan, layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Pemerintah Daerah, dan terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal, beberapa sasaran bersifat inherent dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah di rumuskan pada tahap perumusan masalah.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan.

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Arah kebijakan yang telah disusun akan menjadi pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Rumusan strategis dan arah kebijakan Sekretariat DPRD Kota Makassar dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut ini :



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DPRD KOTA MAKASSAR
TAHUN 2021 – 2026**

Tabel T – C.26
Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategis	Arah Kebijakan				
			2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan DPRD Kota Makassar	Peningkatan kualitas pelayanan kesekretariatan DPRD Kota Makassar	Pengoptimalan fasilitas penyusunan perundang-undangan	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas penyusunan kajian perundang-undangan Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pembahasan Ranperda/Keputusan DPRD/Peraturan DPRD Meningkatkan pelayanan kehumasan dan publikasi kegiatan DPRD 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas penyusunan kajian perundang-undangan Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pembahasan Ranperda/Keputusan DPRD/Peraturan DPRD Meningkatkan pelayanan kehumasan dan publikasi kegiatan DPRD 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas penyusunan kajian perundang-undangan Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pembahasan Ranperda/Keputusan DPRD/Peraturan DPRD Meningkatkan pelayanan kehumasan dan publikasi kegiatan DPRD 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas penyusunan kajian perundang-undangan Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pembahasan Ranperda/Keputusan DPRD/Peraturan DPRD Meningkatkan pelayanan kehumasan dan publikasi kegiatan DPRD 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas penyusunan kajian perundang-undangan Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pembahasan Ranperda/Keputusan DPRD/Peraturan DPRD Meningkatkan pelayanan kehumasan dan publikasi kegiatan DPRD

Visi : Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia Yang "Sombere dan Smart City" dengan Imunitas Kota Yang Kuat untuk semua

Misi 1 : Revolusi Sumber Daya Manusia (SDM) dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM Kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dari indikator korupsi



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DPRD KOTA MAKASSAR
TAHUN 2021 – 2026**

Tujuan	Sasaran	Strategis	Arah Kebijakan				
			2022	2023	2024	2025	2026
		Peningkatan fasilitas penganggaran dan pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pembahasan penganggaran 2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan fungsi pengawasan DPRD 3. Meningkatkan Pengembangan kerjasama dan penjarangan aspirasi masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pembahasan penganggaran 2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan fungsi pengawasan DPRD 3. Meningkatkan Pengembangan kerjasama dan penjarangan aspirasi masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan fungsi pengawasan DPRD 2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan fungsi pengawasan DPRD 3. Meningkatkan Pengembangan kerjasama dan penjarangan aspirasi masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan fungsi pengawasan DPRD 2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan fungsi pengawasan DPRD 3. Meningkatkan Pengembangan kerjasama dan penjarangan aspirasi masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan fungsi pengawasan DPRD 2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan fungsi pengawasan DPRD 3. Meningkatkan Pengembangan kerjasama dan penjarangan aspirasi masyarakat



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DPRD KOTA MAKASSAR TAHUN 2021 – 2026

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya, maka perlu diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan. Program yang tercantum dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Makassar ini dapat dikelompokkan menjadi program yang mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran dan program yang tidak mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran.

Program yang mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran adalah Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD sedangkan program yang tidak mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Untuk merealisasikan Program diatas maka harus diwujudkan melalui kegiatan. Kegiatan yang dimaksud yaitu tindakan nyata dalam jangka waktu pendek 1 (satu) Tahun Anggaran yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kota Makassar dengan mempergunakan dan memanfaatkan berbagi Sumber Daya yang tersedia guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Perhitungan pagu anggaran program pada tahun pertama dan kedua Renstra Sekretariat DPRD dilakukan dengan menentukan output setiap kegiatan kemudian menghitung alokasi pagu dari setiap output kegiatan untuk setiap program. Untuk pagu anggaran program pada tahun ketahun diperhitungkan dengan angka perkiraan anggaran akan naik sebesar 10 % dari tahun sebelumnya.

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kota Makassar Tahun 2021 – 2026 secara rinci dapat dilihat pada Tabel T – C. 27 (terlampir) :



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DPRD KOTA MAKASSAR
TAHUN 2021 – 2026**

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Renstra Sekretariat DPRD Kota Makassar merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjadi dasar Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RENJA) SKPD setiap tahunnya.

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari satu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Makassar juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kota Makassar sebagaimana Tabel berikut :

Target Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kota Makassar

No	Indikator Kinerja Utama	Formulasi
1	2	3
1.	Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Makassar terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan	$\frac{\text{Jumlah Dewan yang puas}}{\text{Jumlah Anggota DPRD}} \times 100 \%$
2.	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana	Kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi
3.	Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu	Kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi
4.	Indeks kepuasan masyarakat	$\frac{\text{Jumlah kriteria IKM yang dipenuhi}}{\text{Jumlah Kriteria IKM}} \times 100 \%$
5.	Persentase keluhan / pengaduan masyarakat yang ditindalanjuti	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang di tindaklanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan}} \times 100 \%$
6.	Nilai hasil evaluasi AKIP	Angka Nilai dari Inspektorat
7.	Persentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindak lanjuti	$\frac{\text{Jumlah temuan BPK}}{\text{Jumlah temuan yang ditindaklanjuti}} \times 100 \%$

Indikator kinerja Sekretariat DPRD Kota Makassar merupakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Makassar Tahun 2021 – 2026 merupakan Indikator Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk mengetahui capaian Indikator Kinerja dari setiap aspek, fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan Pemerintah Kota Makassar dengan kewenangan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan, dimana Sekretariat DPRD Kota Makassar masuk dalam Penunjang Urusan Pemerintahan. Target Sekretariat DPRD Kota Makassar selama kurun waktu lima tahun mendatang tercantum pada table berikut ini :



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DPRD KOTA MAKASSAR
TAHUN 2021 – 2026**

BAB VIII

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kota Makassar Tahun 2021-2026, mengacu pada Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Makassar dan disusun dengan tujuan agar dapat menjawab dan memfokuskan upaya untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan lima tahun ke depan sesuai Visi dan Misi Kota Makassar dalam melaksanakan Program dan Kegiatannya.

Dengan disusunnya Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Makassar Tahun 2021-2026 ini dapat dijadikan dasar dan alat ukur untuk melakukan evaluasi terhadap tingkat pencapaian keberhasilan dari suatu kegiatan yang dilakukan, sekaligus dapat dijadikan dasar untuk pembuatan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan kinerja lima tahunan Sekretariat DPRD. Oleh karena itu diharapkan RENSTRA ini dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan berbagai kegiatan.

Dengan selesainya penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kota Makassar, maka kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Renstra ini terkhusus kepada Tim Transisi, yang telah banyak membantu terhadap Renstra ini.

Demikian penyusunan Renstra Setwan 2021-2026, tentunya penyusunan Renstra ini masih membutuhkan banyak masukan dan saran dari semua pihak, demi perbaikan untuk mencapai hasil yang maksimal sebagaimana yang di harapkan, terima kasih.

Makassar, 27 September 2021

SEKRETARIS DPRD KOTA MAKASSAR
PEMERINTAH KOTA
SETWAN
H. DAHYAL, S.Sos, M.Si
Nid. 19730905 199303 1 007

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra SKPD			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENCIUNGAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	Jumlah administratif/verifikasi yang diteliti	4	Dokumen	1	266.926.000	1	299.618.600	1	322.980.660	0	322.980.660	1	388.278.504	4	1.481.453.566	
				KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	Jumlah Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun	1	Dokumen	0	9.897.700	0	6.421.470	0	7.063.617	0	7.063.617	0	7.769.979	1	32.997.766	
				KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULAN/SEMESTERAN SKPD	Jumlah dokumen penyusunan laporan keuangan bulanan	1	Dokumen	0	7.357.000	0	8.312.700	0	9.143.970	0	9.143.970	0	10.098.367	1	41.942.037	
			4	02-01-02	KEGIATAN ADMINISTRASI KEPERCAYAAN PERANGKAT DAERAH		100%	100%	54.854.890.000	100%	60.340.379.000	100%	66.374.416.500	100%	66.374.416.500	100%	73.011.858.390	1	802.380.744.490	
					PENGADAN PAKYAN DINAS BESERTA TRIBUTU KELEKAPANNYA	Jumlah Orang	973	Orang	115	24.300.000	115	235.950.000	115	239.548.000	23	239.548.000	115	238.499.500	573	1.190.494.500
					SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah Informal dan produk hukum yang diterbitkan kepada masyarakat	300	buku	60	49.84.990.000	60	54.070.159.000	60	59.477.174.900	12	59.477.174.900	60	65.424.982.390	300	270.924.116.200
					BIMBINGAN TEKNIS IMPI EMBENTAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah orang	50	orang	10	5.485.700.000	10	6.034.270.000	10	6.637.697.000	2	6.637.697.000	10	7.301.466.700	50	30.446.133.700
			4	02-01-02	6	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	100%	100%	4.187.714.713	100%	4.606.486.184	100%	5.067.134.802	100%	5.067.134.802	100%	5.373.848.282	1	23.242.197.356	
					PELAYANAN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTORI	Jumlah komponen instalasi/penerangan komponen yang disediakan	29	Item	6	198.313.650	6	132.366.015	6	167.601.317	1	167.601.317	6	194.361.668	29	766.763.390
					PELAYANAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	Jumlah jasa perolehan dan pengadaan barang yang disediakan	4	Item	1	173.366.890	1	190.705.438	1	209.775.982	0	209.775.982	1	230.753.590	4	942.211.380
					PELAYANAN PERALATAN RUMAH TANGGA	Jumlah perolehan alat rumah tangga yang disediakan	29	Item	6	1.591.238.013	6	1.706.361.914	6	1.876.597.995	1	1.876.597.995	6	2.044.697.795	29	8.609.511.591
					PELAYANAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	Jumlah Bahan Logistik	5	Item	1	1.520.700.710	1	1.672.770.877	1	1.840.047.206	0	1.840.047.206	1	2.024.081.926	5	8.440.024.189
					PELAYANAN BARANG CETAKAN DAN PENGACANDAN	Jumlah barang cetakan dan pengadaan	262.747	buku	52.549	79.461.800	52.549	87.407.980	52.549	96.148.778	10.510	96.148.778	52.549	105.763.666	262.747	441.020.214
					PELAYANAN BAHAN BACAAN DAN PEGANTUNAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	205	buku	41	324.280.000	41	386.708.000	41	392.378.800	8	392.378.800	41	431.616.690	205	1.799.783.480
					FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	Jumlah	29	Item	6	400.823.500	6	440.167.750	6	484.184.325	1	484.184.325	6	532.602.978	29	2.220.862.733

Tulisan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Perencanaan												
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra 5KPD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			020102 7	PENGADAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Jumlah Unit	85	77	87	77	87	77	92	77	1	1.697.794.000	17	1.247.573.400	85	7.116.872.400
			020102 7	PENGADAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	Jumlah Unit	14	Item	1	350.000.000	1	385.000.000	1	423.500.000	2	1.200.000.000	5	1.200.000.000	17	5.033.566.000
				PENGADAN ASET TAK BERVULUD	Jumlah Aset	1	pkbt	0	411.400.000	0	452.240.000	0	497.794.000	0	497.794.000	0	547.573.400	1	2.283.307.400
			020102 8	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		85	%	17	4.643.449.395	17	5.129.794.335	17	5.442.773.768	-	5.442.773.768	17	6.207.051.143	85	25.882.546.092
				PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	103	orang	21	2.255.440.440	21	2.480.984.484	21	2.729.082.932	4	2.729.082.932	21	3.001.991.226	103	12.317.899.482
				PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Jumlah penyediaan kebutuhan jasa listrik, telepon dan dll	3	Item	1	1.239.946.433	1	1.363.941.101	1	1.500.335.211	0	1.500.335.211	1	1.650.368.722	3	6.881.815.348
				PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	Jumlah barang dan jasa pelayanan umum kantor	6	Item	1	1.166.040.300	1	1.294.868.750	1	1.413.385.625	0	1.413.385.625	1	1.564.691.188	6	6.482.853.043
			020102 9	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		100	%	20	5.227.734.620	20	5.750.350.082	20	6.323.383.090	-	6.323.383.090	20	6.958.141.399	100	29.014.313.391
				PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BAYU PERIFERON DAN PALAK KENDARAAN PEROGANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	Jumlah jasa periforon dan perlengkapan, mobil jabatan dan jasa periforon barang milik daerah	12	Unit	2	462.748.000	2	509.022.800	2	559.925.080	0	559.925.080	2	615.977.288	12	2.568.393.448
				PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BAYU PERIFERON DAN PALAK KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	Jumlah/kuantitas dan/atau pemeliharaan, jumlah jasa tenaga kontrol	94	unit/orang	19	2.058.972.520	19	2.024.803.172	19	3.217.284.149	4	3.217.284.149	19	3.839.072.644	94	14.757.204.205
				PEMELIHARAAN MEBEL	Jumlah Unit	250	Unit	50	22.000.000	50	24.200.000	50	26.620.000	10	26.620.000	50	29.282.000	250	122.102.000
				PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	Jumlah Unit	350	Unit	70	360.525.000	70	396.577.500	70	436.235.250	14	436.235.250	70	479.858.775	350	2.000.946.525
				PEMELIHARAAN ASET TETAP LAINNYA	Jumlah Unit	5	Unit	1	277.094.500	1	304.806.240	1	335.286.866	0	335.286.866	1	366.815.575	5	1.357.911.321
				PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	Jumlah gedung	23	Jenis	5	1.446.472.500	5	1.591.119.750	5	1.750.231.725	1	1.750.231.725	5	1.925.254.898	23	8.028.053.873
			020102 15	LAYANAN KEUANGAN DAN KESEHATAN DPDD		100	%	20	42.280.093.625	20	46.508.102.988	20	51.158.913.286	-	51.158.913.286	20	56.274.804.615	100	234.658.363.264
				PEMBELANJAKAN ADMINISTRASI KEUANGAN DPDD	Jumlah gaji dan tunjangan beta, wakili dan anggota DPRD	50	orang	10	40.559.103.900	10	43.055.014.290	10	40.560.515.719	2	40.560.515.719	10	54.516.567.291	50	221.326.750.200

1	2	3	4	5	6	7	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendukung											
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Rencana SKPD	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target	2022 Rp.	Target	2023 Rp.	Target	2024 Rp.	Target	2025 Rp.	Target	2026 Rp.	Target	Kondisi Kinerja pada Akhir periode Rencana SKPD Rp.
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19	
				PEMBEDIAAN PAKAAN DINAS DAN ATRIBUT DPRD	Jumlah pasang pakaian dinas	4	1	567.879.000	1	624.660.500	1	687.128.750	0	687.128.750	1	755.841.025	4	3.191.757.875
				PELAKSANAAN MEDICAL CHECK UP DPRD	Jumlah layanan poliklinik kantor	50	10	753.114.725	10	628.426.198	10	911.268.817	2	911.268.817	10	1.002.395.699	50	4.179.855.189
				LAYANAN ADMINISTRASI DPRD		100	20	20.966.726.688	20	23.043.999.356	20	25.569.759.292	20	25.569.759.292	20	27.904.713.221	100	116.547.259.182
				FASILITASI RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DPRD	Jumlah kegiatan	290	98	17.119.800.000	98	18.897.780.000	98	20.787.558.000	12	20.787.558.000	98	22.866.313.800	290	95.549.451.800
				PEMBEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DPRD	Jumlah pendirian cidat rumah tangga yang disediakan	100	20	3.786.526.688	20	4.168.619.356	20	4.582.181.292	4	4.582.181.292	20	5.040.399.421	100	21.077.787.382
				PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Terdapatnya Rencana Kerja Tahunan Perda Setiap Alat/Alat Kelengkapan DPRD Kota Makkassar	Ada	Ada		Ada		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
					Terdapatnya Program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pembentukan Perda dan fungsi Anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan (RPMAD) maupun dokumen rencana tahunan (RKPMD)	Ada	Ada	57.028.162	Ada	59.171.841	Ada	62.453.835	Ada	67.089.390	Ada	73.202.284	Ada	319.007.042
					Terintegrasinya Program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Tahunan DPRD	Ada	Ada		Ada		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
				PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD	Cakupan Laporan perda yang diselesaikan tepat waktu	100	20	13.413.120.000	20	6.594.290.000	20	6.837.318.000	4	2.028.724.000	20	6.318.936.400	100	48.620.775.400
				4 020202 1														
				PEMUSUNAN DAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH	Jumlah penyusunan dan pembahasan perda	20	4	10.226.500.000	4	3.297.118.000	4	3.418.659.500	1	1.041.362.000	4	3.159.468.200	20	26.228.242.700
				PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	Jumlah perda	16	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	1	30.000.000	3	30.000.000	16	6.394.500.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra 5RPD	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				PEVELENGKARBAN KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah kelainan undangan	15	3	551,670,000	3	551,670,000	3	551,670,000	1	551,670,000	3	551,670,000	2,786,350,000	
				FASILITASI PENYUSUNAN PENELITIAN/ITERANCAH DAN/ATAU NASAKAH AKADEMIK	Jumlah Dokuman	12	2	1,500,000,000	2	1,500,000,000	2	1,500,000,000	0	Dokuman	2	1,500,000,000	7,500,000,000	
				PENYUSUNAN TATA TERTBIB DPRD	Jumlah rapat	5	1	332,730,000	1	366,023,000	1	402,627,500	0	50,000,000	1	50,000,000	1,453,902,500	
			020202 2	PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN	Perentase penyelesaian kebijakan anggaran	100	20	386,100,000	20	424,710,000	20	407,181,000	4	407,181,000	20	819,891,100	2,142,990,100	
				PEMBAHASAN KUALA DAN PPA5	Jumlah rapat	20	4	93,500,000	4	102,850,000	4	113,138,000	1	113,138,000	4	124,448,500	918,933,500	
				PEMBAHASAN PERUBAHAN KUALA DAN PERUBAHAN PPA5	Jumlah rapat	20	4	93,500,000	4	102,850,000	4	113,138,000	1	113,138,000	4	124,448,500	918,933,500	
				PEMBAHASAN APBD	Jumlah rapat	20	4	99,950,000	4	65,948,000	4	72,389,500	1	72,389,500	4	79,793,450	382,771,950	
				PEMBAHASAN APBD PERUBAHAN	Jumlah rapat	20	4	99,950,000	4	65,948,000	4	72,389,500	1	72,389,500	4	79,793,450	382,771,950	
				PEMBAHASAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD	Jumlah rapat	20	4	79,200,000	4	67,120,000	4	95,832,000	-	95,832,000	4	108,418,200	439,367,200	
			020202 3	PENCAJASAN PENVEL ENCCAPAN PEMERINTAHAN	Perentase penyelesaian pemerintahan	85	17	6,380,000,000	17	7,018,000,000	17	7,719,800,000	3	7,719,800,000	17	8,491,780,000	38,409,880,000	
				PENCAJASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG HUKUM	Jumlah rapat	25	5	1,726,010,000	5	1,898,611,000	5	2,088,472,100	1	2,088,472,100	5	2,297,319,310	9,379,312,410	
				PENCAJASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG INFRASTRUKTUR	Jumlah Rapat	25	5	1,581,380,000	5	1,706,468,000	5	1,877,109,300	1	1,877,109,300	5	2,044,820,230	8,610,022,330	
				PENCAJASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEREKONOMIAN	Jumlah Rasis	25	5	1,581,380,000	5	1,706,468,000	5	1,877,109,300	1	1,877,109,300	5	2,044,820,230	8,610,022,330	
				PENCAJASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah Rapat	25	5	1,581,380,000	5	1,706,468,000	5	1,877,109,300	1	1,877,109,300	5	2,044,820,230	8,610,022,330	
			020202 4	PENINGKATAN KAPASTAS DPRD	Perentase penyelesaian pada dan non pada	85	17	10,020,701,900	17	11,022,777,090	17	12,129,049,299	3	12,129,049,299	17	13,397,354,229	55,615,804,318	
				PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI DEWAN	Jumlah media	24	5	7,232,496,700	5	7,985,146,310	5	8,751,321,007	1	8,751,321,007	5	9,626,453,108	40,141,041,185	
				PENYEDIAAN KELOMPOK PAKAR DAN TIM AHLI	Jumlah Orang	16	3	268,400,000	3	295,240,000	3	324,764,000	1	324,764,000	3	357,240,400	1,489,644,400	
				PENYEDIAAN TENAGA AHLI FRAKSI	Jumlah Orang	124	25	237,600,000	25	261,360,000	25	287,496,000	5	287,496,000	25	316,245,600	1,387,701,600	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Perencanaan											
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Rencana SKPD	Rp.
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				PEVELENGKARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT	Jumlah Jic dan kegiatan yang diadakan	16	3	2.277.809.200	3	2.208.586.720	3	2.756.144.292	1	2.756.144.292	3	3.081.736.721	16	12.642.028.933
				PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DPRD	Jumlah Rapat	3	4.400.000	1	4.840.000	1	5.324.000	0	5.324.000	1	5.856.400	3	24.420.400	
				PENYERAPAN DAN PENCIPTAPAN ASPRASI MASYARAKAT	penantre penyelesaian kegiatan	88	%	31.480.288.600	17	34.628.289.160	17	38.091.088.076	3	38.091.088.076	17	41.900.189.384	88	174.781.169.420
				KUNJUNGAN KERJA DALAM DAERAH	Antik kegiatan	5	Kegiatan	8.384.200.000	1	8.222.620.000	1	10.144.882.000	0	10.144.882.000	1	11.199.370.200	5	46.593.072.200
				PELAKSANAAN RESES POKOK PIKIRAN	Antik kegiatan	5	Koil	4.950.000	1	5.448.000	1	5.989.500	0	5.989.500	1	6.586.450	5	27.472.900
				PELAKSANAAN RESES	Antik kegiatan	3	Koil	23.091.088.600	1	25.400.194.160	1	27.940.218.376	0	27.940.218.376	1	30.794.234.934	3	128.187.624.270
				PELAKSANAAN DAN PENCAHAYANAN KODE ETIK DPRD	penantre penyelesaian kegiatan	88	%	421.900.000	17	463.430.000	17	509.773.000	3	509.773.000	17	540.750.300	88	2.888.238.300
				PENYUSUNAN KODE ETIK DPRD	Jumlah kegiatan	5	Koil	415.250.000	1	456.773.000	1	502.482.500	0	502.482.500	1	552.697.750	5	2.804.678.250
				PENGAWASAN KODE ETIK DPRD	Jumlah kegiatan	5	Koil	6.090.000	1	6.685.000	1	7.320.500	0	7.320.500	1	8.082.850	5	38.378.050
				PEBAHASAN KERJA SAMA DAERAH	penantre media yang dipublikasikan	88	%	534.600.000	17	588.060.000	17	646.866.000	3	646.866.000	17	711.952.600	88	2.967.078.600
				PENYUSUNAN BAHAN KOMUNIKASI DAN PUBLIKASI	Jumlah media	2	media	534.600.000	0	588.060.000	0	646.866.000	0	646.866.000	0	711.952.600	2	2.967.078.600
				FASILITASI TUJAS DPRD		88	%	827.420.000	17	910.182.000	17	1.001.178.200	3	1.001.178.200	17	1.101.296.020	88	4.592.284.220
				KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUJAS DPRD	Jumlah Rapat	50	Koil	64.900.000	10	71.990.000	10	78.320.000	2	78.320.000	10	86.981.900	50	360.200.900
				PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DPRD	Jumlah Rapat	1	Koil	22.950.000	0	24.809.000	0	27.288.500	0	27.288.500	0	30.014.050	1	128.184.550
				FASILITASI PELAKSANAAN TUJAS BADAN MUSYAWARAH	Jumlah Rapat	28	Koil	46.750.000	5	51.420.000	5	56.567.500	1	56.567.500	5	62.224.250	28	259.466.750
				FASILITASI TUJAS PMPINAN DPRD	Jumlah Rapat	22	Koil	693.220.000	4	762.542.000	4	838.794.200	1	838.794.200	4	922.675.820	22	3.847.434.020

SEKRETARIS DPRD KOTA MAKASSAR

H. DAHYAL, S.Sos, M.Si
NIP. 19730905 199303 1 007